

# Misi Dan Penginjilan Di Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua: Tantangan, Konteks, Dan Transformasi Pelayanan

Marthinus Ngabalin

STT Gereja Protestan Indonesia di Papua, Fakfak

E-mail korespondensi : [marthinussngabalin@gmail.com](mailto:marthinussngabalin@gmail.com)

**Abstract :** *This study examines the dynamics of mission and evangelism within the Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua in the context of social change, religious plurality, and the transformation of church ministry in Papua. Mission and evangelism are understood not merely as efforts to expand church institutions, but as the proclamation of the Gospel centered on the salvific work of Jesus Christ while upholding human freedom and dignity. This research employs a qualitative approach with a descriptive–interpretive method through a literature study of various theological, historical, and contextual sources related to church ministry in Papua. The findings reveal that the implementation of mission within GPI Papua has evolved from an institutional model of evangelism toward a more dialogical, contextual, and transformative approach. Within the multicultural and multireligious context of Papuan society, the church is challenged to develop a paradigm of peaceful mission that emphasizes social service, interreligious dialogue, education, healthcare, and community empowerment as integral dimensions of Christian witness. The study further identifies several major challenges faced by GPI Papua’s mission ministry, including social changes driven by modernization and digitalization, interreligious relations, limited ministerial resources, and the need for contextual theological formation. Therefore, the transformation of church mission should be directed toward strengthening the spirituality of ministry, increasing congregational participation, and developing mission approaches that are relevant to the social realities of Papuan society. In this sense, church mission is understood not only as verbal proclamation, but also as the praxis of ecclesial presence that embodies peace, justice, and social solidarity within society.*

**Keywords:** *church mission, evangelism, GPI Papua, ministry transformation, interreligious dialogue, Papua.*

## 1. Pengantar

Pada hakikatnya, misi dan penginjilan merupakan tindakan **pemberitaan yang disengaja dan sadar**, yaitu upaya untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami secara benar. Dalam konteks ini, misi atau Pekabaran Injil (PI) merujuk pada pemberitaan mengenai karya keselamatan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pusat dari pemberitaan tersebut bukanlah institusi keagamaan, gereja, atau rumusan doktrin tertentu, melainkan pribadi Kristus dan karya penyelamatan-Nya (Bosch, 1991, hlm. 389–393).

Dengan demikian, tujuan utama penginjilan bukanlah sekadar membawa seseorang masuk ke dalam identitas kekristenan secara formal, melainkan mempertemukan manusia secara autentik dengan Kristus. Hal ini berarti bahwa pesan yang disampaikan harus jelas, benar, dan tidak mengalami distorsi, baik melalui penambahan maupun pengurangan demi kepentingan pragmatis agar lebih mudah diterima. Konsekuensinya, pemberitaan Injil yang setia pada kebenaran harus siap menghadapi berbagai respons, termasuk penolakan. Oleh sebab itu, penginjilan perlu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi

kebebasan individu, yakni memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengambil keputusan secara sadar tanpa tekanan, manipulasi emosional, maupun eksploitasi situasi tertentu. Dengan kata lain, penerimaan terhadap Injil harus lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena paksaan atau rekayasa (Darmaputera, 2001: 420-424).

Atas dasar pemahaman di atas, Eka Darmaputera menawarkan tiga strategi yang tepat untuk pelaksanaan PI (Darmaputera, 2001: 420-424). *Pertama*, PI dari pribadi ke pribadi (*person to person*). Strategi ini dilakukan melalui persahabatan atau hubungan baik dengan pribadi. Keunggulan strategi ini adalah: a), tidak mudah menjadi batu sandungan yang tidak perlu; b), memungkinkan orang lebih mampu menjelaskan tentang Kristus sejas-jelasnya dan selengkap-lengkapinya melalui proses dialogis yang saling menghormati; c), memungkinkan orang mengambil keputusan secara jelas dan sadar; d), memungkinkan semua atau sebanyak mungkin orang Kristen ikut serta dalam strategi ini, yaitu ciptakanlah dan tumbuhkanlah *image* atau citra yang baik tentang kehidupan Kristiani (Filipi 4:5).

*Kedua*, PI seluas mungkin melalui orang-orang yang jauh sekalipun. Tujuannya adalah Injil diberitakan, tidak perlu dipersoalkan siapa pemberitanya, apakah jemaat/gereja, atau orang dari gereja/jemaat tertentu. Strategi ini mengarah pada usaha memampukkan orang-orang melaksanakan PI. Dalam strategi ini diperlukan semacam *support system* yang efektif. Yang mesti dilakukan ialah menolong orang yang menderita untuk tetap eksis, tetapi juga survive dalam hidup mereka. *Ketiga*, pelayanan di rumah sakit dan di sekolah (terutama Pendidikan Dasar). Orang yang berada dalam situasi ini, paling terbuka mendengar pewartaan Injil. Syaratnya adalah harus ada manajemen atau pelayanan berjangkauan dengan lembaga-lembaga ini. Terutama dalam strategi ini, pembinaan para perawat dan para guru. Di samping itu, di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta, kini tumbuh pula *trend* baru pelayanan rohani Kristen Oikumenis. Penting sekali pembinaan motivasi yang benar dan karena itu pula cara-cara yang benar dan penciptaan kondisi yang memadai sebagai pendukung.

Kekristenan di Indonesia memiliki Kompetensi Sosiologis dan Kompetensi Teologis (Titaley, 2013, hlm. 18–28). Kompetensi Sosiologis Kekristenan untuk ikut menyuarakan suara kenabiannya bisa mulus bila upaya

memberikan nuansa teologis pada kompetensi itu berjalan. Muatan teologis ini perlu pula supaya misi Kristen itu tidak hanya dalam hitungan kuantitas. Tidak hanya hitungan seberapa anggota yang telah dibaptis, tetapi seberapa jauh tanggung jawab sosial lintas batas (agama) Kekristenan terhadap sesama manusia dan warga negara (*the others*). Secara historis, kehadiran gereja di wilayah Papua tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pekabaran Injil yang berlangsung sejak awal abad ke-20. Pelayanan misi yang dilakukan oleh Utrechtsche Zending Vereeniging (UZV) menjadi salah satu titik awal perkembangan gereja di wilayah selatan Papua (*Nieuw-Guinea*). Dalam perkembangannya, pada periode 1930-1935 terjadi penataan wilayah pelayanan antara UZV dan Indische Kerk (IK), termasuk penyerahan wilayah pelayanan di Kaimana dan Fakfak (Felubun, 2007, hlm. 5). Proses tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur pelayanan gereja yang kemudian berkembang di wilayah Papua bagian selatan. Perjalanan menuju kemandirian gereja berlangsung secara bertahap. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1978 melalui Sidang Proto Sinode di Merauke yang meresmikan lembaga Gereja Protestan Indonesia (GPI) Irian Barat. Proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 25 Mei 1985 ketika GPI Irian Jaya secara resmi dikukuhkan sebagai gereja mandiri yang terpisah dari Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam ibadah pengesmian di Gereja Ebenhaezer Fakfak (Terma, 2017, hlm. 16–71). Sejak saat itu, gereja terus berkembang sebagai institusi yang melayani jemaat di wilayah Papua bagian selatan. Pada tahun 2003, melalui Sidang Sinode, nama gereja secara resmi diubah menjadi Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) sebagai penyesuaian dengan perkembangan administratif wilayah Papua.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji misi dan penginjilan dalam konteks Gereja Protestan Indonesia di Papua, suatu ranah yang masih relatif jarang disentuh dalam studi empiris bergereja di GPI Papua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti Cristovel Van Harling (2025) yang lebih menitikberatkan pada hubungan antara struktur pemerintahan gereja dengan nilai-nilai budaya masyarakat Papua, seperti musyawarah, egalitarianisme, dan kehidupan komunal, serta menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mengakomodasi partisipasi jemaat dalam praktik pengambilan keputusan gerejawi. Atau Wensly Peniel Raparap

(2025) yang menganalisis pada peningkatan kompetensi Guru Sekolah Minggu (GSM) melalui pelatihan teknik mengajar interaktif berbasis budaya lokal Papua, khususnya dengan memanfaatkan cerita rakyat sebagai media pembelajaran Alkitab di lingkungan pelayanan GPI Papua Jemaat Eden Wagom. Proim, A V, dkk (2025), menganalisis dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi dan kekhayusan jemaat dalam ibadah di Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua Bethel Fakfak. Temuan-temuan ini beririsan dengan Gereja Protestan Indonesia di Papua dalam praksis pelayanan, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menempatkannya dalam kerangka misi dan penginjilan gereja lokal di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan dengan judul “Misi dan Penginjilan di Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua: Tantangan, Konteks, dan Transformasi Pelayanan” disusun secara sistematis dalam beberapa bagian utama. Pertama, pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, tinjauan mengenai pelaksanaan penginjilan (PI) di lingkungan GPI Papua sebagai landasan deskriptif dan analitis. Ketiga, pembahasan mengenai relasi antaragama yang diarahkan pada pengembangan misi damai dalam konteks kemajemukan. Keempat, elaborasi mengenai pembaruan paradigma misi dan penginjilan yang menekankan transformasi pendekatan pelayanan gereja secara kontekstual.

## 2. Tinjauan Literatur

### 1. Misi dan Transformasi Gereja

Perkembangan pemahaman mengenai misi gereja menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada ekspansi kelembagaan menuju pendekatan yang lebih kontekstual, dialogis, dan transformatif. Dalam paradigma lama, misi sering dipahami sebagai upaya memperluas wilayah pelayanan dan meningkatkan jumlah anggota gereja melalui kegiatan penginjilan. Akan tetapi, perkembangan teologi misi kontemporer menempatkan misi bukan sekadar sebagai aktivitas pertumbuhan institusional, melainkan sebagai keterlibatan gereja dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia. Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk hadir secara aktif dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, misi gereja memiliki keterkaitan erat antara dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. (Bosch, 1991, hlm. 389–393).

Menurut David J. Bosch, hakikat misi gereja berakar pada konsep *missio Dei*, yakni karya Allah yang terus berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam pemahaman ini, gereja bukanlah pusat dari misi itu sendiri, melainkan sarana yang dipakai Allah untuk menghadirkan keselamatan, perdamaian, dan pembaruan bagi dunia. Konsekuensinya, misi gereja tidak hanya diwujudkan melalui pemberitaan Injil secara verbal, tetapi juga melalui praktik kehidupan yang mencerminkan kasih, keadilan, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, penginjilan dan pelayanan sosial dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam kesaksian gereja di tengah masyarakat. (Bosch, 1991, hlm. 390–392).

Dalam kerangka misi transformatif, gereja dipandang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, konflik, dan marginalisasi kelompok tertentu. Misi gereja harus diwujudkan melalui pelayanan yang menghadirkan pembebasan, harapan, dan pemulihan bagi masyarakat yang mengalami penderitaan. Selain itu, dalam masyarakat yang majemuk, gereja juga dituntut membangun relasi yang dialogis dengan kelompok agama dan budaya lain sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, misi Kristen tidak hanya diarahkan pada pertobatan individual, tetapi juga pada transformasi kehidupan sosial yang lebih adil, damai, dan manusiawi. (Newbigin, 1989, hlm. 116–120; Darmaputera, 2001, hlm. 420–424).

Paradigma misi yang kontekstual dan transformatif tersebut menjadi dasar penting dalam memahami perkembangan pelayanan Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua. Dalam konteks masyarakat Papua yang multikultural dan multireligius, pelayanan gereja tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan penginjilan verbal, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam membangun perdamaian dan solidaritas sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan Injil secara relevan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan teknologi yang terus berubah di Papua. Dengan demikian, transformasi misi di GPI Papua menjadi bagian penting dalam memperkuat kehadiran gereja yang kontekstual, inklusif, dan

berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Titaley, 2013, hlm. 18–28; Lattu, 2006, hlm. 6–7).

## 2. Penginjilan dalam Masyarakat Majemuk

Lesslie Newbigin dalam *The Gospel in a Pluralist Society* menegaskan bahwa pewartaan Injil di tengah masyarakat yang majemuk tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat dominatif, eksklusif, atau memaksakan kehendak. Dalam konteks masyarakat modern yang plural, gereja dipanggil untuk menghadirkan Injil melalui kesaksian hidup yang nyata, relasi yang dialogis, serta penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan iman. Injil tidak boleh disampaikan dengan klaim superioritas agama, melainkan melalui kehadiran gereja yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan pelayanan sebagaimana teladan Kristus di tengah keberagaman manusia. Dengan demikian, misi Kristen dipahami sebagai kesaksian yang hidup dalam ruang publik yang tetap menghargai pluralitas sosial dan religius. (Newbigin, 1989, hlm. 116–120).

Sejalan dengan itu, Paul F. Knitter menegaskan bahwa dialog antaragama merupakan elemen penting dalam tanggung jawab iman Kristen di tengah masyarakat multireligius. Dialog tidak dipahami sebagai ancaman terhadap identitas kekristenan, tetapi sebagai ruang pertemuan untuk membangun saling pengertian, kerja sama kemanusiaan, dan upaya bersama dalam mewujudkan perdamaian. Dalam konteks pluralisme agama, gereja dipanggil untuk bersikap terbuka terhadap pertemuan dengan tradisi iman lain, sambil tetap bersaksi tentang iman kepada Kristus secara etis dan humanis. Dengan demikian, dialog antaragama tidak hanya diposisikan sebagai strategi sosial, tetapi juga sebagai ekspresi spiritualitas Kristen yang menjunjung tinggi martabat manusia. (Knitter, 2014, hlm. 8–22).

Pendekatan misi yang dialogis dan inklusif tersebut sangat relevan dengan konteks Papua, khususnya Fakfak, yang dikenal memiliki tradisi toleransi dan relasi harmonis antarumat beragama. Dalam kehidupan sosial masyarakat Fakfak, nilai-nilai persaudaraan lintas agama tercermin dalam berbagai praktik budaya seperti “Satu Tungku Tiga Batu,” “Gereja Maghi,” dan “Mesjid Maghi,” yang menegaskan kuatnya ikatan sosial yang melampaui batas identitas agama (Ngabalin, Lattu, & Sumanto, 2025, hlm. 55–84). Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki modal sosial dan

kultural yang kuat dalam membangun kehidupan bersama yang damai di tengah keberagaman. Oleh karena itu, pengembangan misi gereja di Papua perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut sebagai dasar untuk memperkuat dialog, kebersamaan, dan penghormatan terhadap pluralitas. (Ngabalin, Lattu, & Listyani, 2026, hlm. 281–316)..

## 3. Sejarah dan Dinamika Pelayanan GPI Papua

Kajian historis mengenai Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua menunjukkan bahwa gereja ini berakar dari proses panjang pekabaran Injil di wilayah Papua bagian selatan yang berlangsung sejak era pelayanan lembaga zending dan Indische Kerk. Kehadiran gereja tidak terlepas dari aktivitas misioner *Utrechtsche Zendings Vereeniging* (UZV) serta dinamika gereja kolonial pada awal abad ke-20. Dalam proses tersebut, wilayah seperti Fakfak, Kaimana, dan Merauke menjadi pusat penting perkembangan kekristenan di Papua bagian selatan. Pekabaran Injil pada masa itu tidak hanya berdampak pada kehidupan religius, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan, layanan kesehatan, serta perubahan sosial dalam masyarakat Papua. (Felubun, 2007, hlm. 5–20).

Selanjutnya, Felubun dan Termas menjelaskan bahwa proses menuju kemandirian GPI Papua berlangsung secara bertahap melalui perjalanan organisasi dan pelayanan gereja yang panjang. Tonggak penting terjadi pada Sidang Proto Sinode tahun 1978 di Merauke yang menjadi dasar pembentukan Gereja Protestan Indonesia (GPI) Irian Barat. Proses ini mencapai puncaknya pada 25 Mei 1985 ketika GPI Irian Jaya resmi menjadi gereja mandiri yang terpisah dari Gereja Protestan Maluku (GPM). Perubahan tersebut mencerminkan upaya gereja untuk membangun identitas pelayanan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat Papua. Kemudian, pada Sidang Sinode tahun 2003, nama gereja berubah menjadi Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan administratif dan identitas wilayah Papua. (Termas, 2017, hlm. 16–71).

Dalam perkembangan mutakhir, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelayanan GPI Papua terus mengalami transformasi seiring dinamika sosial masyarakat Papua. Cristophel van Harling menyoroti sistem presbiterial-sinodal GPI Papua yang mencerminkan nilai musyawarah,

kebersamaan, dan kehidupan komunal masyarakat Papua. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi gereja, tetapi juga sebagai representasi budaya lokal yang menekankan partisipasi jemaat dalam pengambilan keputusan gerejawi. Hal ini menunjukkan adanya proses kontekstualisasi dalam tata kelola gereja yang lebih partisipatif dan berbasis nilai-nilai budaya Papua. (van Harling, 2025).

Selain itu, penelitian Wensly Peniel Raprap menekankan pentingnya pendekatan pendidikan kontekstual dalam pelayanan gereja melalui penguatan kompetensi Guru Sekolah Minggu berbasis budaya lokal Papua. Sementara itu, Proim dan rekan-rekan mengkaji dampak digitalisasi terhadap kehidupan ibadah jemaat, khususnya penggunaan smartphone dalam ibadah gereja. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa GPI Papua berada dalam proses transformasi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, gereja perlu melakukan pembaruan paradigma misi dan pelayanan yang kontekstual, tanpa melepaskan identitas spiritual serta nilai-nilai lokal yang menjadi dasar kehidupan bergereja. (Raprap, 2025, hlm. 261–273; Proim et al., 2025, hlm. 46–55).

### 3. Metode

Penelitian mengenai misi dan penginjilan di lingkungan Gereja Protestan Indonesia di Papua ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif–interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dinamika penginjilan dan pekabaran Injil tidak hanya sebagai aktivitas gerejawi, tetapi juga sebagai praktik sosial, teologis, dan kultural yang berlangsung dalam konteks masyarakat Papua. Melalui pendekatan deskriptif–interpretatif, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena secara sistematis, melainkan juga menafsirkan makna, nilai, serta konteks praksis misi gereja dalam kehidupan jemaat dan masyarakat (Creswell, 2017, hlm. 18–21). Penelitian ini dilaksanakan melalui studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menelusuri, membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian (Galvan & Galvan, 2024, hlm. 7–11). Sumber-sumber tersebut meliputi buku, artikel jurnal ilmiah,

tesis, disertasi, dokumen gerejawi, laporan penelitian, serta berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan teologi misi, penginjilan, gereja di Papua, dan konteks sosial-budaya masyarakat Papua.

Melalui studi literatur, peneliti berupaya memahami perkembangan pemikiran mengenai misi dan penginjilan, menemukan konsep-konsep teologis yang relevan, serta mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan pelayanan gereja dalam konteks Papua. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan metodologis yang menjadi dasar dalam menganalisis praktik misi dan penginjilan di lingkungan gereja. Dengan demikian, metode ini membantu penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana misi dan penginjilan dipahami, dijalankan, dan dimaknai oleh gereja dalam realitas sosial dan budaya Papua secara ilmiah, kontekstual, dan sistematis (Ngabalina, Lattu, & Listyani, 2026, hlm. 281–316).

### 4. Hasil

Pada bagian ini penulis dapat menyajikan Hasil Kajian ini menganalisis tinjauan pelaksanaan pekabaran Injil di Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua secara periodik berdasarkan dinamika sidang-sidang sinode sebagai penanda perkembangan pelayanan gereja. Analisis dimulai dari tahap awal (1978–1985) yang mencakup masa Proto Sinode, Sidang Sinode I, serta Sidang Sinode Istimewa, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan pada tahun 1987 melalui Sidang Sinode II. Selanjutnya, penelitian ini menelusuri Tahap II (1989–1994) pada Sidang Sinode III, Tahap III (1994–1997) pada Sidang Sinode IV, Tahap IV (1997–2003) pada Sidang Sinode V, Tahap V (2003–2008) pada Sidang Sinode VI, Tahap VI (2008–2013) pada Sidang Sinode VII di Timika, Tahap VII (2013–2018) pada Sidang Sinode VIII di Kaimana, Tahap VIII (2018–2022) pada Sidang Sinode IX di Jayapura, hingga Tahap IX (2022–2027) pada Sidang Sinode X di Merauke. Selain itu, kajian ini juga mengelaborasi dinamika relasi antaragama yang diarahkan pada pengembangan misi damai dalam konteks masyarakat majemuk, serta mendeskripsikan pembaruan paradigma misi dan penginjilan (PI) yang menekankan transformasi pendekatan pelayanan gereja agar lebih kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

## 5. Pembahasan

### 1. Menganalisis Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pekabaran Injil di GPI Papua

Sebagai gereja yang melayani masyarakat Papua, Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) menyadari bahwa pelayanan gereja harus dijalankan secara kontekstual dengan menghargai realitas sosial dan budaya setempat. Sejak awal perkembangannya, gereja tidak hanya berperan dalam membangun kehidupan rohani jemaat, tetapi juga berupaya menghargai dan merangkul kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Papua. Pengalaman historis tersebut menjadi dasar penting dalam merancang pelayanan gereja yang relevan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Dalam kerangka pemahaman teologisnya, GPI Papua memaknai hakikat gereja sebagai Tubuh Kristus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota berdasarkan karunia yang diterima dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Pada saat yang sama, GPI Papua juga memahami dirinya sebagai perwujudan dari Gereja yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli di segala tempat dan sepanjang masa, serta sebagai satu keluarga Allah yang hidup dalam persekutuan iman (GPI Papua, 2022).

Dalam kehidupan bergereja, GPI Papua juga menegaskan dirinya sebagai rumah bersama bagi seluruh warganya, tempat di mana setiap orang dipersatukan dalam kasih, pelayanan, dan tanggung jawab bersama sebagai umat Tuhan. Landasan teologis tersebut dipertegas melalui moto gereja, yaitu “Kami Memberitakan Kristus yang Tersalib” (1 Korintus 1:23a) (GPI Papua, 2022), yang menegaskan pusat pemberitaan Injil dan arah seluruh pelayanan gereja. Dalam kerangka pelayanan tersebut, GPI Papua merumuskan visi sebagai berikut: “Menjadi sebuah institusi yang tersusun secara rapi, sebuah persekutuan yang utuh, yang setia dalam ibadah, bersaksi, dan melayani, serta kehadirannya senantiasa menjadi berkat.” Sejalan dengan visi tersebut, misi pelayanan GPI Papua diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan gereja, peningkatan komitmen pelayanan jemaat, pemberdayaan masyarakat, upaya mewujudkan Tanah Papua sebagai zona damai, serta menghadirkan berkat bagi manusia, lingkungan, dan seluruh ciptaan (Dokumen Profil GPI Papua, 2026).

Dalam pelaksanaannya, pelayanan GPI Papua tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial yang dihadapi masyarakat Papua. Tantangan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah pelayanan. Selain itu, luasnya wilayah pelayanan yang tersebar di berbagai daerah administrasi pemerintahan menghadirkan keragaman konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan gereja. Situasi ini menuntut gereja untuk mengembangkan pendekatan pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan jemaat dan masyarakat.

Fase Pekabaran Injil (PI) dalam konteks GPI Papua dapat dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya bersifat historis-misioner, tetapi juga berkembang dalam kerangka institusional melalui tahapan-tahapan periodisasi pelayanan. Dalam hal ini, fase PI kemudian diartikulasikan lebih lanjut dalam bentuk periode menengah (lima tahunan) yang dijalankan di bawah kepemimpinan Majelis Pekerja Sinode. Pendekatan periodisasi lima tahunan ini mencerminkan upaya gereja untuk menata pelayanan secara lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Setiap periode kepemimpinan Majelis Pekerja Sinode tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai locus strategis dalam merumuskan visi teologis, prioritas program, serta arah pengembangan pelayanan gereja sesuai dengan konteks zamannya.

Dengan demikian, fase PI tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas penginjilan dalam arti sempit, melainkan sebagai kerangka besar yang mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta transformasi sosial umat. Kepemimpinan Majelis Pekerja Sinode dalam setiap periode lima tahunan menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan antara mandat teologis gereja dan implementasi praksisnya di tengah dinamika masyarakat Papua. Namun demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, periodisasi ini perlu dielaborasi lebih lanjut berdasarkan masing-masing kepemimpinan Majelis Pekerja Sinode, termasuk tema, kebijakan strategis, serta capaian utama yang dihasilkan dalam setiap periode pelayanan tersebut. Adapun tahap dan fase tersebut sebagai berikut:

### *1.1. Tahap I : 1978 – 1985 (Proto Sinode, Sidang Sinode I & Sidang Sinode Istimewa)*

#### *Fase Proto Sinode*

Perjuangan menuju terbentuknya gereja yang mandiri secara institusional menunjukkan perkembangan yang semakin terarah dan sistematis dari waktu ke waktu. Momentum penting dalam proses ini terjadi melalui Rapat Kerja I para ketua klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) se-Irian Barat yang diselenggarakan di Merauke pada bulan September 1972. Rapat kerja tersebut menghasilkan sebuah memorandum yang menegaskan komitmen resmi untuk membentuk gereja yang berdiri sendiri. Selanjutnya, memorandum tersebut dibahas dalam Sidang Sinode ke-26 GPM yang berlangsung di Ambon pada bulan November 1972 (Termas, 2017, hlm. 18).

Proses pelebagaan gereja mandiri ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang dan melalui sejumlah tahapan strategis. Beberapa langkah penting dalam proses tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pendirian Sekolah Teologi Menengah pada tahun 1973 di Fakfak, yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pelayan gereja. Kedua, pembentukan Badan Persiapan Gereja Mandiri yang diketuai oleh Pdt. Gerson Iba dan berkedudukan di Fakfak. Badan ini berperan penting dalam menyelenggarakan Sidang Proto Sinode di Merauke pada tanggal 4–9 Mei 1978, yang menjadi forum resmi untuk meresmikan lembaga gereja baru dengan nama Gereja Protestan Indonesia di Irian Barat.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 1980, Rapat Pimpinan Klasis GPM di wilayah selatan Irian Barat mengeluarkan sebuah deklarasi yang mendesak agar keputusan Sidang Proto Sinode tahun 1978 segera direalisasikan. Desakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pekerja Harian Sinode GPM melalui penerbitan Surat Keputusan Nomor 12/IX/Org tertanggal 18 Februari 1981, yang secara resmi mengatur pelebagaan Gereja Protestan Indonesia di Irian Jaya.

#### *Fase 1985- (Sidang Sinode I)*

Fokus pada Tema lima Tahunan “Yesus Kristus adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup [Yoh 14:6]”. Merepresentasikan fondasi kristologis yang menjadi arah normatif bagi GPI Papua pada fase awal pembentukannya sebagai gereja mandiri.

Tema ini tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan iman, tetapi juga sebagai kerangka teologis yang menuntun proses penataan identitas, orientasi, dan praksis kelembagaan gereja.

Periode ini ditandai sebagai fase yang penuh tantangan, terutama terkait dengan upaya meneguhkan eksistensi GPI Irja sebagai institusi gerejawi yang baru berdiri dan harus membangun legitimasi internal maupun eksternal. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategis difokuskan pada pembentukan struktur organisasi yang kokoh, termasuk penetapan struktur dan personalia Badan Pekerja Harian Sinode GPI Irja sebagai pusat koordinasi pelayanan gereja. Selain itu, capaian penting pada fase ini adalah perumusan perangkat normatif kelembagaan melalui penyusunan Tata Gereja serta tujuh Peraturan Organik GPI Irja, yang meliputi Peraturan Sinode, Klasis, Jemaat, Majelis Jemaat, Pemilihan Majelis Jemaat, Perbendaharaan, dan Disiplin Gereja. Keseluruhan perangkat ini menjadi landasan yuridis-eklesiologis dalam mengatur kehidupan dan tata kelola gereja secara sistematis (Helweldery, 2009, hlm. 78–95).

Dengan demikian, tema kristologis yang diusung pada periode ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip integratif yang menopang proses institusionalisasi gereja, sehingga GPI Papua mampu bertumbuh sebagai gereja yang teratur, mandiri, dan berakar pada pengakuan iman kepada Kristus sebagai pusat kehidupan dan pelayanan (Felubun, 2007, hlm. 20).

*Tahun 1987 (Sidang Sinode Istimewa: Sidang Sinode II).* Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 25–31 Mei 1987 di Fakfak merupakan Sidang Istimewa dengan agenda strategis yang berfokus pada penyesuaian tata kelembagaan gereja terhadap dinamika regulasi nasional. Salah satu keputusan utama dalam sidang ini adalah pengintegrasian **Pancasila** sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke dalam Tata Gereja GPI Irja.

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap tuntutan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mensyaratkan setiap organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam konteks ini, GPI Irja menunjukkan sikap adaptif dan akomodatif terhadap kerangka hukum nasional, tanpa melepaskan identitas teologisnya sebagai

lembaga gerejawi. Secara formal, pengintegrasian tersebut dituangkan dalam Bab V Pasal 8 Tata Gereja tahun 1987, yang menegaskan bahwa GPI Irja merupakan lembaga yang berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketetapan ini mencerminkan upaya gereja untuk meneguhkan posisi institusionalnya dalam tatanan negara, sekaligus membangun relasi yang konstruktif antara iman Kristen dan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks Indonesia.

### **1.1.1. Tahap II : 1989 – 1994 (Sidang Sinode III)**

Fokus pada Tema “Firman-Mu itu Pelita Bagi Kakiku (Mazmur 109:105)”. Dan Sub Tema “Bertumbuhlah dalam persekutuan untuk bersaksi dan melayani sebagai wujud gereja yang memberitakan”. Mencerminkan orientasi teologis GPI Papua yang menempatkan firman Tuhan sebagai dasar normatif sekaligus penuntun praksis kehidupan bergereja.

Tema ini menegaskan bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai sumber pencerahan dan arah bagi gereja dalam menavigasi dinamika pelayanan, baik pada level spiritual maupun organisatoris. Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan gereja tidak hanya dipahami secara kuantitatif, tetapi terutama sebagai proses pendewasaan iman dalam persekutuan (*koinonia*) yang berdampak pada kesaksian (*marturia*) dan pelayanan (*diakonia*). Sidang Sinode yang diselenggarakan di Fakfak pada tanggal 3–10 Desember 1989 menjadi momentum strategis dalam mempertegas arah tersebut. Dalam konteks ini, penekanan pada pertumbuhan dalam persekutuan sekaligus mengindikasikan pentingnya konsolidasi internal gereja sebagai prasyarat bagi penguatan peran eksternal.

Lebih lanjut, tema dan subtema ini mengandung implikasi pada penguatan kapasitas organisasi dan pelayanan. Gereja dipanggil untuk membangun sistem kelembagaan yang lebih tertata, meningkatkan kualitas sumber daya pelayan, serta memperdalam spiritualitas umat agar mampu menjalankan fungsi pemberitaan secara efektif dan kontekstual. Dengan demikian, firman Tuhan tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga kekuatan transformatif yang menggerakkan gereja menuju bentuk pelayanan yang lebih terarah, integratif, dan berdaya guna.

### **1.3.1. Tahap III : 1994 – 1997 (Sidang Sinode IV)**

Tema “Berikanlah Kami Makanan yang Secukupnya (Matius 6:11)” dan Sub Tema: “Mempersiapkan para pelayan Firman dan umat gereja untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab bagi kesejahteraan bersama”. Merefleksikan suatu respons teologis yang kontekstual terhadap dinamika pembangunan dan persoalan kemiskinan di Tanah Papua.

Pada fase ini, perumusan tema dan subtema tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah melalui peluncuran program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1993. GPI Irja secara sadar mengambil posisi partisipatif dengan menyatakan dukungan terhadap tujuan utama program tersebut, yakni menjadikannya sebagai gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, sebagai strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan, serta sebagai instrumen dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, gereja tidak hanya memposisikan diri sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang berperan aktif dalam mempersiapkan pelayan dan umat untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Upaya ini diarahkan pada terciptanya kesejahteraan bersama yang berkeadilan, sekaligus sebagai wujud konkret dari iman yang dihidupi dalam konteks sosial-ekonomi.

Sebagai implikasi praksis, sosialisasi program IDT oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya dijadikan sebagai salah satu agenda utama dalam kegiatan prasidang Sinode IV, yang menunjukkan adanya sinergi antara gereja dan pemerintah dalam upaya transformasi sosial. Dengan demikian, tema ini menegaskan integrasi antara dimensi teologis dan pembangunan, di mana kebutuhan dasar manusia dipahami tidak hanya sebagai isu material, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab iman dalam menghadirkan kesejahteraan yang holistik.

### **1.4. Tahap IV : 1997 – 2003 (Sidang Sinode V)**

Tema “Bekerjalah dengan tangan kamu (I Tes 4: 11)”. Dan Sub Tema: “Dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan etos kerja menuju kemandirian umat dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila memasuki abad XXI. Merepresentasikan suatu respons teologis-kontekstual gereja terhadap realitas sosial-ekonomi yang dihadapi

masyarakat di Tanah Papua (Helweldery, 2009, hlm. 108–112).

Perumusan tema ini tidak dapat dilepaskan dari pergumulan konkret terhadap persoalan kemiskinan dan ketertinggalan yang masih melingkupi sebagian besar masyarakat. Dalam konteks tersebut, gereja mengartikulasikan panggilannya untuk mendorong transformasi melalui penguatan etos kerja, solidaritas komunal, serta pembangunan kemandirian umat sebagai bagian integral dari kesaksian iman. Di sisi lain, tema ini juga beririsan dengan dinamika politik yang berkembang pada masa itu, khususnya proses perumusan kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Baik pemerintah maupun masyarakat di wilayah yang saat itu masih dikenal sebagai Irian Jaya tengah berada dalam fase refleksi dan negosiasi mengenai arah pembangunan yang lebih adil dan kontekstual. Puncaknya, pada tahun 2001, pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya, yang menjadi landasan baru dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, tema dan subtema ini memperlihatkan upaya GPI Papua untuk mengintegrasikan dimensi teologis, sosial, dan kebangsaan, dengan menekankan pentingnya kerja sebagai ekspresi iman sekaligus sarana pemberdayaan menuju kemandirian umat dalam kerangka pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

### **1.5. Tahap V : 2003 – 2008 (Sidang Sinode VI)**

Tema “Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan (Lukas 4: 19)”. Dan Sub Tema: Dengan sehati sepikir dalam satu jiwa, satu tujuan, GPI Papua bertekad membina dan membangun masyarakat baru, yang adil, aman dan sejahtera di Tanah Papua”, merupakan suatu formulasi teologis yang lahir dari refleksi kontekstual gereja terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik di Papua.

Penetapan tema ini dapat dipahami sebagai upaya reflektif-teologis GPI Papua dalam merumuskan dasar normatif sekaligus arah praksis bagi pemahaman dan respons gereja terhadap implementasi Otonomi Khusus yang tengah digencarkan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, gereja tidak menempatkan dirinya sebagai entitas yang terpisah dari proses pembangunan, melainkan sebagai mitra kritis dan partisipatif yang turut memberi makna teologis terhadap agenda transformasi sosial.

Lebih lanjut, tema dan subtema ini mengafirmasi komitmen kolektif GPI Papua untuk membangun kesatuan visi dan orientasi pelayanan (“sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan”) dalam rangka menghadirkan tatanan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Komitmen tersebut beririsan secara strategis dengan empat bidang prioritas pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Dengan demikian, pelayanan gereja diproyeksikan tidak hanya dalam dimensi spiritual, tetapi juga dalam keterlibatan aktif yang bersifat holistik, integratif, dan transformatif bagi kehidupan masyarakat.

### **1.6. Tahap VI : 2008 – 2013 (Sidang Sinode VII di Timika)**

Tema “Iman Tanpa Perbuatan adalah Mati (Yakobus 2:17, 26)” dan Sub Tema: GPI Papua terus berkarya dan melayani dalam upaya mewujudkan tanda-tanda sejahtera Kerajaan Allah di bumi Papua menuju masyarakat mandiri yang rukun, damai, sehat sejahtera, berpengetahuan dan berkeadilan. merefleksikan suatu kesadaran teologis yang kritis sekaligus konstruktif dalam kehidupan bergereja.

Tema ini menegaskan adanya refleksi diri GPI Papua terhadap kecenderungan praksis iman yang selama ini lebih banyak diekspresikan dalam bentuk *verbal*, melalui pengakuan iman, formulasi doktrinal, serta kredo-kredo gereja, dibandingkan dengan perwujudannya dalam tindakan konkret yang berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat pengakuan implisit atas adanya kesenjangan antara dimensi normatif iman dan realisasi praksisnya dalam kehidupan sosial dan pelayanan gereja. Melalui perumusan tema dan subtema ini, GPI Papua mengarahkan dirinya pada upaya reorientasi teologis dan praksis, yakni mendorong integrasi antara iman dan perbuatan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Iman tidak lagi dipahami semata sebagai pengakuan konseptual, melainkan sebagai kekuatan transformatif yang harus diwujudkan dalam aksi nyata, program pelayanan yang berkesinambungan, serta kontribusi konkret bagi terwujudnya tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, visi tentang masyarakat Papua yang mandiri, rukun, damai, sehat, sejahtera, berpengetahuan, dan berkeadilan menjadi horizon etis sekaligus praksis dari iman yang hidup dan operatif.

Implementasi dalam program yang telah berlangsung dalam kurun waktu lima tahun ini, adalah: Pelayanan pendidikan; Pelayanan kesehatan; Pelayanan Hukum dan HAM; Pengembangan ekonomi jemaat; Perhatian terhadap lingkungan hidup; Peningkatan hubungan antara denominasi gereja dan Peningkatan hubungan antar agama

### 1.7. Tahap VII : 2013 – 2018 (Sidang Sinode VIII di Kaimana)

Tema “Bertolong-Tolonglah Menanggung Bebanmu (Galatia 6:2a)”. Dan Sub Tema “GPI Papua terus bersatu, bersaksi dan melayani; berjuang mewujudkan karya Kristus; menjadikan Papua sebagai rumah Tuhan bagi segala bangsa”. Mencerminkan komitmen teologis dan praksis gerejawi dalam memperkuat kesaksian dan pelayanan yang berlandaskan semangat solidaritas dan saling menopang.

Penetapan tema ini, baik secara eksplisit maupun implisit, merupakan ekspresi keseriusan GPI Papua dalam membangun kehidupan bergereja yang responsif terhadap realitas internalnya. Secara khusus, tema ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program pelayanan di tingkat Klasis dan Jemaat. Terdapat disparitas yang cukup signifikan antarwilayah pelayanan, di mana sebagian Klasis dan Jemaat telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan program dan tanggung jawab kelembagaan, sementara wilayah lainnya masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan menghadapi keterbatasan struktural maupun sumber daya. Situasi tersebut mengandung implikasi reflektif bagi gereja sebagai institusi, bahwa terdapat tuntutan untuk memenuhi kewajiban organisatoris demi menjaga keberlangsungan dan eksistensi pelayanan. Namun demikian, melampaui dimensi institusional tersebut, gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menghidupi nilai belarasa (*compassion*) dan solidaritas, dengan secara aktif merespons serta menanggung pergumulan yang dialami oleh sesama anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, semangat “bertolong-tolongan” tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi terwujud dalam praksis konkret kehidupan bergereja yang inklusif, partisipatif, dan transformatif.

Secara eksplisit maupun implisit, subtema ini memuat setidaknya tiga komitmen utama yang hendak diwujudkan oleh GPI Papua dalam horizon pelayanannya. *Pertama*, GPI Papua berupaya menjaga konsistensi dalam

mengaktualisasikan tri panggilan gereja, sebagaimana tercermin dalam rumusan “terus bersatu, bersaksi, dan melayani.” Formulasi ini menegaskan orientasi gereja pada dimensi koinonia, marturia, dan diakonia sebagai satu kesatuan praksis yang integral. *Kedua*, GPI Papua menegaskan bahwa seluruh panggilan dan pengabdian gerejawi berakar dan berorientasi pada perwujudan karya Kristus. Dengan demikian, setiap bentuk pelayanan tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas institusional, melainkan sebagai partisipasi iman dalam karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. *Ketiga*, GPI Papua mengartikulasikan visi eklesiologis yang inklusif dengan mengupayakan Papua sebagai “rumah Tuhan bagi segala bangsa.” Visi ini mengandung dimensi teologis dan sosial yang menekankan keterbukaan, penerimaan, serta persekutuan lintas identitas dalam terang kasih Allah.

Secara keseluruhan, ketiga komitmen tersebut menunjukkan bahwa GPI Papua berupaya menata arah pelayanan lima tahunan ke depan dengan menempatkan perwujudan karya Kristus sebagai prioritas utama, yang secara konkret diekspresikan melalui pembangunan kehidupan bersama yang inklusif dan transformatif, menjadikan Papua sebagai ruang teologis dan sosial yang merefleksikan kehadiran Allah bagi semua (Rewasan, 2013, hlm. 16).

### 1.8. Tahap VIII : 2018 – 2022 (Sidang Sinode IX di Jayapura)

Tema “Rapi Tersusun dan Diikat Menjadi Satu” (Efesus 4:16), dengan subtema “Berdasarkan kasih Kristus Yang Mengikat Satukan Kita Sebagai Keluarga Allah Hendaklah Kita Bertolong-Tolong Menanggung Beban Dalam Menunjukkan Gereja Yang Mandiri dan Misioner,” dapat dipahami sebagai formulasi teologis yang merepresentasikan tahap kulminatif dalam dinamika perjalanan pelayanan GPI Papua. Tema ini lahir dari proses reflektif dan deliberatif yang berlangsung dalam forum strategis gereja, seperti Rapat Kerja Sinodal (RAKERDAL) dan Rapat Badan Pekerja Sinode (BPS), yang menegaskan arah dan orientasi pelayanan ke depan.

Secara substantif, tema ini mengandung dorongan transformasional agar gereja tidak terjebak dalam pola programatik yang bersifat rutin dan stagnan, melainkan berani melakukan reorientasi pelayanan yang kontekstual, dinamis, dan berdaya guna. Dalam kerangka implementatif, GPI Papua merumuskan empat

kata kunci utama yang dioperasionalkan dalam rencana pelayanan lima tahunan. Tahun *pertama* difokuskan pada pendalaman makna kasih Allah sebagai fondasi teologis; tahun *kedua* hingga ketiga menekankan penguatan identitas sebagai keluarga Allah; tahun *ketiga* diarahkan pada pembangunan kemandirian gereja; sementara tahun *keempat* dan *kelima* berorientasi pada pengembangan karakter misioner gereja dalam konteks pelayanan yang lebih luas.

### 1.9. Tahap IX : 2022 – 2027 (Sidang Sinode X di Merauke)

Tema “Kobarkanlah Karunia Allah yang Ada Padamu (2 Timotius 1:6)” dan sub Tema Dalam Keragaman Karunia, GPI Papua Bertumbuh menjadi Gereja Mandiri dan Misioner Di Tengah Zaman yang Berubah. Merepresentasikan orientasi teologis yang menekankan dinamika karismatik gereja sebagai basis pertumbuhan dan transformasi pelayanan.

Tema ini menegaskan bahwa keberagaman karunia dalam tubuh Kristus bukanlah realitas yang fragmentatif, melainkan sumber daya spiritual yang harus diaktualisasikan secara produktif dan konstruktif demi pembangunan gereja. Dalam kerangka tersebut, GPI Papua diarahkan untuk mengembangkan potensi internalnya secara optimal guna mewujudkan kemandirian sekaligus memperkuat karakter misionernya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Secara praksis, implementasi tema ini tampak dalam sejumlah langkah strategis, antara lain pemekaran wilayah pelayanan melalui pembentukan Klasis dan Jemaat baru sebagai respons terhadap kebutuhan pastoral dan pertumbuhan umat. Selain itu, dilakukan pula amandemen terhadap Tata Gereja sebagai upaya penyesuaian struktural dan normatif agar lebih relevan dengan perkembangan konteks pelayanan. Di bidang lain, kesadaran akan pentingnya media sebagai sarana komunikasi dan pelayanan mendorong gereja untuk mengembangkan Media Center sebagai instrumen pewartaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, termasuk pengembangan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

Dengan demikian, tema ini memperlihatkan integrasi antara dimensi spiritual, kelembagaan, dan kontekstual, di mana

pengembangan karunia tidak hanya dipahami dalam arti individual, tetapi juga sebagai energi kolektif yang mendorong gereja menuju kemandirian dan daya misi yang berkelanjutan.

### 2. Relasi Antaragama dan Misi Gereja

Tidak dapat disangkal bahwa Kekristenan merupakan salah satu tradisi keagamaan dengan keragaman subkelompok yang sangat luas. Dalam konteks tersebut, gereja dihadapkan pada tantangan reflektif untuk kembali menegaskan identitas iman yang esensial, yakni menjadi pengikut Kristus (*Christian*), bukan semata-mata pengikut institusi gereja (*churchian*). Kesadaran ini menuntut pergeseran orientasi dari loyalitas sektarian menuju spiritualitas yang berpusat pada Kristus sebagai dasar kesatuan (Lattu, 2006, hlm. 6–7). Sejalan dengan itu, gereja-gereja dipanggil untuk keluar dari kondisi fragmentasi menuju upaya rekonsiliasi dan persatuan. Transformasi ini mencakup perubahan dari sikap saling menyalahkan menuju dialog intra-religius, serta dari pola relasi yang eksklusif dan saling mengasingkan menuju kerja sama yang konstruktif. Dalam konteks ini, GPI Papua dituntut untuk secara serius merefleksikan dan merumuskan peran serta makna kehadirannya di tengah realitas pluralitas yang kompleks.

Lebih lanjut, Kekristenan tidak dapat menghindari relasinya dengan agama-agama lain dalam posisi yang konfrontatif (*vis-à-vis*). Sebaliknya, keterbukaan terhadap dialog antaragama menjadi keniscayaan teologis dan sosial. Dialog tersebut mensyaratkan transformasi paradigma, yakni dari memandang pemeluk agama lain sebagai kompetitor atau bahkan “musuh” (*enemy image*), menjadi mitra (*partner*) dalam membangun kehidupan bersama. Persepsi negatif terhadap agama lain tidak dapat dilepaskan dari beban historis kolonialisme Barat yang seringkali menginstrumentalisasi Kekristenan dalam proyek ekspansi kekuasaan, yang dikenal melalui semboyan “*Gold, Glory, and Gospel*.” Meskipun demikian, penting ditegaskan bahwa Kekristenan dan Barat merupakan dua entitas yang berbeda dan tidak dapat disamakan secara identik. Oleh karena itu, Kekristenan di Indonesia, termasuk GPI Papua, ditantang untuk mengembangkan identitas yang kontekstual dan berakar dalam realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pembangunan relasi yang tulus, dialogis, dan setara dengan agama-agama lain. Prasyarat utama menuju arah tersebut adalah pengembangan sikap

beragama dan refleksi teologis yang terbuka dan inklusif.

Dalam kerangka pemikiran Paul F. Knitter (2002), terdapat beberapa model pendekatan antaragama yang perlu dikritisi. termasuk Kekristenan tidak bisa mengembangkan cara beragama *Replacement*, satu agama mengatasi semua agama; atau *Fulfillment*, semua agama benar menurut pandangan satu agama. Kekristenan Indonesia juga tidak bisa menghidupkan sikap *Acceptance*, mengakui agama lain tetapi tidak saling berhubungan. Keristenan kita harus mengedepankan sikap *Mutuality*, menerima agama lain dan terbuka untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan (Knitter, 2014, hlm. 8–22). Dengan demikian, arah teologis yang perlu dikembangkan oleh GPI Papua adalah membangun praksis iman yang dialogis, inklusif, dan transformatif, di mana keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang perjumpaan yang menghadirkan kesaksian Kristiani yang otentik di tengah masyarakat plural

Konsep *mutuality*, sebagai salah satu pendekatan dalam kerangka pluralisme, tidak dapat dipahami sebagai sikap beragama yang terlepas dari landasan biblika. Sebaliknya, pendekatan ini justru berakar pada pemahaman iman yang terbuka dan dialogis, yang memungkinkan Kekristenan untuk tetap memberikan kontribusi kritis dan konstruktif dalam relasinya dengan agama-agama lain. Keterbukaan tersebut bukan berarti relativisme, melainkan suatu bentuk kesadaran teologis yang mengakui pentingnya perjumpaan dan pertukaran makna dalam konteks kehidupan bersama. Dalam praksisnya, dialog kehidupan (*dialogue of life*) yang berangkat dari realitas keseharian menjadi ruang konkret bagi terbangunnya relasi lintas iman. Melalui interaksi yang tidak dibatasi oleh latar belakang agama, umat diajak untuk terlibat dalam solidaritas yang autentik, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan demikian, dialog tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjelma dalam tindakan bersama yang menyentuh dimensi kehidupan nyata.

Lebih lanjut, dialog yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas terhadap mereka yang menderita mendorong umat beragama untuk keluar dari “ghetto” keagamaan yang eksklusif. Proses ini membuka ruang bagi terbentuknya ikatan sosial yang lebih kuat dan inklusif antarsesama manusia. Dalam konteks

tersebut, tindakan umat tidak lagi didorong oleh kepentingan sempit kelompok atau identitas keagamaan tertentu, melainkan oleh komitmen terhadap kemanusiaan bersama. Dengan demikian, orientasi dialogis dalam kerangka *mutuality* mengarahkan umat beragama untuk bertindak atas dasar solidaritas universal, bukan demi kepentingan parsial, tetapi demi kebaikan bersama (*common good*). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa praksis iman yang autentik tidak hanya terwujud dalam kesetiaan doktrinal, tetapi juga dalam keterlibatan aktif dalam membangun kehidupan bersama yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

### 3. Menganalisis Pembaharuan Paradigma Misi dan PI [Penginjilan]

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Gereja Protestan Indonesia di Papua memiliki peluang strategis untuk mengembangkan pelayanan yang relevan dan berdampak kontekstual. Keanekaragaman budaya serta kuatnya jaringan komunitas lokal merupakan modal sosial yang signifikan dalam membangun pelayanan gereja yang inklusif dan berakar pada realitas masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi membuka ruang bagi perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan koordinasi antarjemaat, serta penguatan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, kehadiran gereja di Tanah Papua tidak semata-mata dipahami sebagai eksistensi institusional administratif, melainkan sebagai perwujudan panggilan iman untuk menghadirkan kesaksian gereja di tengah kehidupan sosial. Secara teologis, gereja meyakini bahwa eksistensinya merupakan bagian dari panggilan ilahi untuk mewujudkan karya pelayanan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Oleh karena itu, arah pelayanan gereja senantiasa diarahkan pada upaya memperkuat kehidupan iman jemaat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Sehubungan dengan itu, terdapat sejumlah kesadaran kolektif yang menjadi dasar pengembangan misi dan penginjilan ke depan.

*Pertama*, gereja-gereja menyadari adanya krisis ekologi global yang semakin serius, bahkan dapat dipahami sebagai suatu “krisis peradaban” akibat akumulasi dosa-dosa ekologis manusia. Dalam konteks ini, gereja mengakui keterlibatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama ketika tidak

menjalankan fungsi profetis melalui advokasi terbuka terhadap kerusakan lingkungan, maupun melalui praktik hidup warga gereja yang turut berkontribusi terhadap pencemaran, seperti penggunaan plastik yang berlebihan. Oleh karena itu, tanggung jawab ekologis harus dipahami sebagai bagian integral dari panggilan bergereja. Kesadaran ini mendorong pengembangan misi ekologis secara sinodal, meliputi tingkat sinode, klasis, dan jemaat—dalam semangat *sun-hodos* (berjalan bersama), melalui pembentukan dan penguatan jejaring advokasi, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, bekerja sama dengan lembaga oikumenis, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, misi ekologis menjadi ekspresi nyata dari solidaritas gereja bersama seluruh ciptaan.

*Kedua*, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), melalui Dokumen Keesaan Gereja 2024–2029, menegaskan pentingnya konsep *ecclesia domestica* sebagai strategi oikumenis dalam menjawab berbagai krisis multidimensional (*poly-crisis*), khususnya krisis keluarga, pendidikan, dan tantangan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2024, hlm. 16–50). Fenomena sosial kontemporer, seperti meningkatnya angka perceraian, praktik pinjaman online dan judi online, serta relasi digital yang minim interaksi fisik, menunjukkan adanya disrupsi dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, era digital juga melahirkan persoalan baru seperti tekanan media, gangguan kesehatan mental, keterasingan individu, kehampaan spiritual, kecemasan, kesepian, dan kelelahan psikologis (*burnout*). Kondisi ini berimplikasi pada munculnya gejala disintegrasi spiritual dalam keluarga, di mana praktik-praktik iman seperti ibadah bersama, doa, nyanyian, dan pembacaan Alkitab semakin berkurang. Akibatnya, iman cenderung bersifat individualistik dan tidak lagi dibangun dalam kerangka komunal keluarga sebagai “gereja domestik”.

*Ketiga*, keterlibatan gereja dalam ranah politik dipahami baik secara personal maupun institusional. Secara teologis, partisipasi politik tersebut dapat dimaknai sebagai wujud empati dan keberpihakan terhadap realitas kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang mengalami ketidakadilan dan penderitaan. Dengan demikian, keterlibatan ini tidak semata-mata bersifat pragmatis, tetapi merupakan ekspresi tanggung jawab iman untuk menghadirkan keadilan,

perdamaian, dan martabat manusia, sekaligus tetap menjaga integritas moral dan spiritual gereja sebagai komunitas iman.

## 6. Simpulan

Artikel ini menegaskan bahwa misi dan penginjilan dalam Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua merupakan ekspresi panggilan iman yang inheren dan tidak terpisahkan dari kompleksitas realitas sosial, kultural, dan religius masyarakat Papua yang plural. Dalam kerangka tersebut, misi tidak lagi direduksi sebagai aktivitas ekspansionis gereja, melainkan dipahami sebagai keterlibatan aktif dalam karya Allah yang bersifat transformatif dan holistik, yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif David J. Bosch yang melihat misi sebagai gerakan dinamis yang berakar pada kasih Allah bagi dunia.

Dalam konteks praksis, GPI Papua dituntut untuk mengembangkan strategi misi yang kontekstual dan berkelanjutan guna merespons dinamika perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang. Hal ini mengandaikan adanya pendekatan misi yang berakar pada budaya lokal dan kearifan masyarakat Papua, sehingga pewartaan Injil dapat dihadirkan secara relevan dan bermakna. Selain itu, peningkatan kapasitas para pelayan gereja dalam memahami pluralitas agama dan budaya menjadi kebutuhan mendesak, agar pelayanan yang dijalankan bersifat dialogis, inklusif, dan responsif terhadap konteks. Penguatan pelayanan di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi juga perlu diposisikan sebagai bagian integral dari misi gereja, sebagai manifestasi konkret kehadiran gereja dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital menjadi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan serta menghadirkan komunikasi Injil yang kreatif, adaptif, dan kontekstual di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, dalam ranah akademik, kajian mengenai misi kontekstual masih terbuka luas untuk terus dikembangkan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih empiris dan kontekstual, terutama melalui studi tentang praktik misi di berbagai jemaat GPI Papua. Analisis mengenai relasi antara gereja dan komunitas adat dalam menghadapi perubahan sosial juga menjadi penting untuk memahami dinamika interaksi secara komprehensif. Selain itu, penelitian

tentang peran gereja dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Papua merupakan bidang strategis yang relevan dengan konteks pluralitas yang ada. Pada akhirnya, diperlukan upaya pengembangan model teologi misi yang berakar pada pengalaman lokal dan narasi komunitas, sehingga mampu menghasilkan konstruksi teologis yang kontekstual, relevan, dan transformatif bagi kehidupan masyarakat.

### 7. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai misi dan penginjilan di Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, terdapat beberapa rekomendasi akademik, pastoral, dan kelembagaan yang perlu diperhatikan yaitu: GPI Papua perlu mengembangkan paradigma misi yang kontekstual, dialogis, dan transformatif melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta keterlibatan dalam isu kemanusiaan dan perdamaian di tengah masyarakat Papua yang multikultural dan multireligius. Selain itu, gereja perlu memperkuat pendidikan dan pembinaan teologi misi yang kontekstual bagi para pelayan gereja agar mampu menjalankan misi yang menghormati martabat manusia, menjunjung dialog antaragama, serta responsif terhadap tantangan modernisasi dan digitalisasi. GPI Papua juga perlu membangun pelayanan kolaboratif lintas agama dan lintas sektor dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal persaudaraan dan solidaritas sosial sebagai dasar pengembangan misi damai melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

### 8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga analisis yang dilakukan lebih bertumpu pada data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen gereja, dan sumber tertulis lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini belum sepenuhnya menghadirkan pengalaman empiris langsung dari jemaat, pelayan gereja, maupun masyarakat Papua melalui penelitian lapangan. Kedua, fokus penelitian ini lebih diarahkan pada konteks Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh gereja di Papua yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan tradisi pelayanan yang berbeda. Ketiga, dinamika misi dan penginjilan di Papua terus berkembang seiring perubahan sosial, politik, teknologi, dan relasi

antaragama, sehingga kajian ini masih membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih interdisipliner dan berbasis data lapangan.

### 9. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada Majelis Pekerja Sinode (MPS) Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua atas berbagai dokumen dan informasi yang mendukung penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, rekan akademisi, dan pelayan gereja yang telah memberikan masukan, diskusi, dan refleksi kritis terkait dinamika misi dan penginjilan di Papua. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada lembaga pendidikan teologi dan semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangan kajian teologi kontekstual dan dialog antaragama di Papua. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praksis bagi pengembangan pelayanan gereja, penginjilan, dan kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif di Papua.

### Pustaka Acuan

- Bosch, D. J. (1991). *Transformasi misi Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darmaputera, E. (2001). *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks terpilih Eka Darmaputera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Felubun, J. M. (2007). *Sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua*. Fakfak: Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua.
- Galvan, M. C., & Galvan, J. L. (2024). *Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences* (8th ed.). Routledge.
- Gereja Protestan Indonesia di Papua. (2022). *Amandemen tata gereja GPI Papua*. Merauke: Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua.

- Gereja Protestan Indonesia di Papua. (2026). *Dokumen profil GPI Papua*. Diakses 10 April 2026, dari <https://sinodegpipapua.id/>
- Harling, C. van. (2025). Presbiterial sinodal: Sebuah kajian manajemen gereja terhadap sistem bergereja GPI Papua. *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(2). <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak>
- Helweldery, R. (2009). *Laporan penelitian potret diri Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua)* (Tidak diterbitkan). Fakfak: STT Gereja Protestan Indonesia di Papua.
- Knitter, P. F. (2014). *Introducing theologies of religion*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Knitter, Paul F. 2011. "Doing Theology Interreligiously: Union and the Legacy of Paul Tillich." *CrossCurrents* 61(1):117–32. <https://doi.org/10.1353/cro.2011.a783216>
- Lattu, I. Y. M. (2006). Critical engagement kekristenan dalam konteks Indonesia (Sebuah catatan reflektif). Dalam *Format rekonstruksi kekristenan: Menggagas teologi misiologi dan ekklesiologi kontekstual di Indonesia* (hlm. 6–7). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Newbiggin, L. (1989). *The Gospel In A Pluralist Society*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Ngabalin, M., Lattu, I. Y., & Listyani, L. (2026). Interreligious dialogue in Indonesia: Reading Fakfak's interfaith experiences through Paul F. Knitter. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 20(2), 281–316.
- Ngabalin, Marthinus, Izak Y. M. Lattu, Sumanto Al Qurtuby, and Tony Tampake. 2025. "Tombor Maghi as an Interfaith Ritual: Lived Religion among Muslims and Christians in West Papua, Indonesia." *IJORESH: Indonesian Journal of Religion, Spirituality, and Humanity* 4(1):55–84. <https://doi.org/10.18326/ijores.v4i1.55-84>.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. (2024). *Dokumen keesaan gereja 2024–2029*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
- Proim, A. V., Syakema, L. J., Tupamahu, M., Letsoin, R. G., & Ritiau, E. I. (2025). Menjaga kekhusyukan ibadah di era digital: Analisis penggunaan smartphone dalam ibadah di Gereja Bethel Fak-Fak. *Kognisio: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 46–55. <https://doi.org/10.63284/jk.v1i1.1>
- Raprap, W. P. (2025). Penguatan kompetensi guru sekolah minggu melalui pelatihan teknik mengajar kontekstual di GPI Papua Eden Wagon. *Jurnal PKM Setiadharna*, 6(3), 261–273. <https://doi.org/10.47457/jps.v6i3.664>
- Rewasan, R. (2013). GPI Papua terus bersatu, bersaksi dan melayani; berjuang mewujudkan karya Kristus; menjadikan Papua sebagai rumah Tuhan bagi segala bangsa. *Jurnal Ilmiah Daya Wacana*, 2(3).
- Termas, J. A. (2017). *Memori seputar sejarah lahirnya Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua)*. Fakfak: Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Protestan Indonesia di Papua.
- Titaley, J. A. (2013). *Religiositas di alinea tiga: Pluralisme, nasionalisme, dan transformasi agama-agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press.